

NEGOSIASI KOLOMBIA DENGAN KELOMPOK GERILYA KIRI FARC-EP (*FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO DEL PUEBLO*) TAHUN 2012-2016

**Asih Dewi Lestari¹
NIM. 1402045014**

Abstract

The problem of unequal distribution of land in Colombia raises internal conflicts within the state. From this problem led to emergence of the left guerrilla group called FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia - Ejército Del Pueblo) which then led to armed conflict with the Colombian government for more than 50 years. Negotiations have been conducted since 1982, but always fail. During the president Juan Manuel Santos, finally the two sides agreed to make peace. The success of the negotiation process could not be separated from the declining power of the FARC-EP, the role of the third parties in the negotiation process and the achievement of 6 peace agreement agendas that includes the demands and interests of both parties. This agreement becomes the foundation for creating lasting peace.

Keywords: Colombia, FARC-EP, Negotiation

Pendahuluan

Kolombia adalah jajahan Spanyol yang merdeka pada tahun 1819. Sejak kemerdekaannya tersebut kondisi Kolombia tidak menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik, namun justru menjadi awal konflik yang terus berlanjut sepanjang abad ke 19. Konflik internal terpanjang yang dialami di Kolombia adalah konflik pemerintah dengan kelompok gerilya kiri bernama *Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia - Ejército Del Pueblo* (FARC-EP) yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun. Menurut laporan *Center for Security Studies* (CSS) mencatat bahwa konflik tersebut merupakan yang terpanjang di daratan negara barat (Enzo Nussio. 2016).

Akar dari konflik tersebut adalah adanya distribusi tanah yang sangat tidak adil bagi masyarakat Kolombia, yang mana permasalahan ini telah terjadi sejak era kolonialisasi sekitar tahun 1492-1810. Menurut sebuah laporan oleh Oxfam International menunjukkan bahwa segelintir kaum elit sebanyak 1% dari populasi memiliki 80% dari tanah dan menyisakan 20% tanah untuk didistribusikan diantara 99% sisa dari populasi masyarakat Kolombia. Oxfam menyimpulkan bahwa Kolombia merupakan negara yang paling tidak setara di Amerika Latin dalam hal

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : asihdewi.wind@gmail.com.

distribusi tanah (<https://pbicolombia.org/2018/01/02/so-much-land-in-the-hands-of-so-few/>).

Perpolitikan modern mulai berkembang di Kolombia yang menghasilkan sistem 2 partai, yang terdiri dari Partai Konservatif dan Partai Liberal ditahun 1840an. Munculnya partai politik pada pertengahan abad 19 ini tidak membawa dampak positif bagi negara, justru mengaktifkan kaum elit untuk menguasai lahan di Kolombia. Terjadi peningkatan distribusi tanah yang tidak merata, karena perluasan lahan publik dikuasai oleh pemerintah baru dan kaum elit yang jumlahnya kecil hanya sekitar 0,2% tetapi sangat istimewa dan kuat, seperti tuan tanah kaya, gereja, dan perusahaan (Carl Sernbo. 2013: 4).

Pada kepemimpinannya partai-partai tersebut memiliki konsepsi yang berbeda mengenai pertanahan. Pemerintahan Partai Liberal melakukan berbagai upaya reformasi pertanahan dan menghapus praktek perbudakan. Sedangkan Partai Konservatif berdasarkan pada integrasi gereja katolik dan peraturan negara. Gereja dan para ulama gereja secara tradisional menjadi pemilik tanah yang sangat besar. Perbedaan tersebut memicu keduanya untuk saling menggulingkan kepemimpinan masing-masing. Hal ini menyebabkan disetiap pergantian kepemimpinan antar keduanya selalu diwarnai dengan konflik. Pada akhirnya konflik-konflik internal tersebut menghancurkan kapasitas para politisi untuk memerintah (Dea Miranda. 2014: 3).

Kondisi internal didalam pemerintahan yang tidak stabil mempengaruhi peranannya untuk melakukan perbaikan terhadap permasalahan distribusi tanah ini yang justru terus melakukan kesalahan yang sama yaitu cenderung hanya menguntungkan para elit saja. Pada abad 20-an pemasalahan mulai berkembang dan kemiskinan yang dialami oleh mayoritas buruh tani mendorong terciptakan gerakan protes yang memunculkan serikat buruh agraria. Kemudian gelombang protes semakin tinggi sehingga menciptakan gerakan yang menggunakan dasar ideologi sayap kiri yang berubah menjadi partai komunis. Partai ini menjalin hubungan dengan partai liberal yang berhaluan moderat kiri.

Peristiwa besar terjadi pada tahun 1948 dimana salah satu tokoh politik partai liberal beraliran kiri yaitu Jorge Eliecer Gaitan tewas terbunuh. Tokoh ini memiliki pengaruh besar di Kolombia terutama dikalangan kaum bawah dan mendedikasikan dirinya demi keadilan serta kesejahteraan bagi mereka. Gaitan pun mampu mendapatkan simpati rakyat terutama dari kaum miskin dan buruh tani, sehingga mereka memberi kepercayaan bahwa Gaitan mampu menegakkan keadilan. Kemudian Gaitan pun maju menjadi kandidat pemilihan presiden ditahun 1950.

Kematian Gaitan pada 6 April 1948 telah memprovokasi terjadinya kekerasan di Kolombia. Radio setempat mengumumkan bahwa tindakan pembunuhan itu dilakukan oleh anggota dari partai konservatif. Kekerasan tersebut pun menyebar hampir keseluruhan kolombia. Aksi tersebut dilakukan oleh pejuang dari kedua partai yang berlangsung selama satu dekade (1948-1958). Tragedi ini disebut *La Violencia* yang telah menimbulkan korban lebih dari 200.000 korban jiwa (Roberto Mignone: 3)

Pemerintah Kolombia berusaha untuk mengakhiri konflik dan memperbaiki diri untuk mengurangi ketidakadilan dengan membentuk Front Nasional. Kesepakatan ini dibuat oleh partai konservatif dan liberal dengan tujuan kedua partai bersedia untuk memimpin Kolombia secara bergantian selama 16 tahun. Namun usaha ini tidak berhasil karena dianggap sebagai perjanjian para elit kedua partai dan masih belum mampu mengatasi permasalahan distribusi tanah. Front Nasional meninggalkan kesan buruk bagi kelompok beraliran kiri dan merasa sangat kecewa. Hal ini menjadi pemicu munculnya kelompok-kelompok gerilya kiri seperti FARC-EP, *Ejercito de Liberacion Nacional* (ELN) dan *Ejercito Popular del Pueblo* (EPL).

Dari ketiga kelompok besar tersebut, FARC-EP merupakan kelompok gerilya kiri terbesar dan terkuat di Kolombia yang dibentuk oleh para pejuang dari partai liberal dan komunis yang selamat dari peristiwa *La Violencia*. Dipelopori oleh pemimpin gerakan gerilya kiri Manuel Marulanda Velez bersama sekitar 43 gerilyawan lainnya membentuk FARC-EP ditahun 1964. Marulanda mulai melakukan perekrutan anggota dengan membujuk kelompok dimasyarakat yang merasa diri mereka diabaikan oleh pemerintah Kolombia. Keanggotaan didominasi oleh kaum agraris yang miskin. Tujuan awal FARCEP adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dimana kebutuhan penduduk pedesaan yang miskin dapat ditangani.

FARC-EP berkembang dengan pesat selama beberapa dekade. Untuk bertahan memenuhi kebutuhannya dan membangun kekuatan, mereka mencari sumber daya dari aktivitas kriminal. Pendapatan kelompok diperoleh dari perdagangan obat terlarang, FARC-EP awalnya mulai mengumpulkan pajak dari petani ganja dan koka di daerah yang mereka kendalikan, namun peran mereka dalam perdagangan obat bius berkembang dengan cepat. Keterlibatan FARC-EP dalam perdagangan obat bius pun diperdalam untuk mencakup semua tahap pengolahan obat, termasuk budidaya, perpajakan dari tanaman obat, pengolahan, dan distribusi serta melakukan penambangan emas ilegal. FARC-EP juga melakukan tindak kekerasan, penculikan, pemerasan pada lawannya dan masyarakat sipil sebagai sumber pengaruh dan pendapatan (June S. Beittle. 2015: 3). Tindakan FARC-EP ini akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata antara pemerintah Kolombia dan FARC-EP. Konflik ini terus berlarut-larut yang telah berlangsung hingga 50 tahun lebih lamanya.

Dari konflik bersenjata tersebut, menurut laporan *The National Centre of Historical Memory and the Victim Registry* terdapat 265.708 orang terbunuh, lebih dari 46.000 kasus penghilangan paksa, 6.827.447 orang terlantar, lebih dari 28.000 korban penculikan, 10.964 orang dibunuh atau dilukai oleh ranjau, 14.847 korban kekerasan seksual, 7.964 anak di bawah umur direkrut paksa, lebih dari 9.800 kasus penyiksaan. (Avocats Sans Frontieres. 2015: 3).

Konflik berkepanjangan ini akhirnya memimbulkan negosiasi antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Pemerintah telah melakukan beberapa kali negosiasi agar konflik ini dapat segera berakhir dimulai dari tahun 1982 dibawah kepemimpinan presiden Belisario Betancur, namun mengalami kegagalan yang terus berlanjut sampai pada kepemimpinan presiden Uribe. Sampai pada masa kepemimpinan presiden Juan Manuel Santos yang mulai menjabat pada tahun 2010,

negosiasi antara kedua belah pihak mengalami kemajuan dari ketidakberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh para presiden sebelumnya.

Kerangka Dasar Teori

Teori Negosiasi

Konflik merupakan salah satu aspek yang tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Satu kebiasaan khas dalam konflik yaitu memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan pihaknya sendiri (Hugh Miall, Oliver Ramsbotham and Tom Woodhouse. 2002: 8). Konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Untuk menyelesaikan konflik tersebut pihak yang bertikai dapat melakukan negosiasi agar memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat mewujudkan perdamaian (K.J. Holsti. 1988: 169).

Menurut Roger Fisher dan William Ury bahwa negosiasi sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan saat pihak satu dan pihak lain memiliki beberapa kepentingan yang sama atau pun yang berbeda (Roger Fisher and William Ury: 6). Dalam istilah luas, kegiatan negosiasi memerlukan perdagangan konsesi dan penemuan opsi untuk keuntungan bersama. Tawar-menawar menguji kepentingan masing-masing dan mengeksplorasi solusi yang sesuai. Pihak yang melakukan negosiasi memiliki tujuan dan hubungan yang berbeda satu sama lain. Penting untuk memeriksa konteks tawar menawar, sejarah keterlibatan negosiasi, dan permasalahan dari konflik tersebut (Ho Won Jeong. 2010: 151).

Terdapat 2 paradigma didalam negosiasi, yaitu paradigma *Bargaining* dan *Problem-Solving* yang mana keduanya membagi asumsi dasar sifat negosiasi. Negosiasi dapat didefinisikan oleh kedua pendekatan sebagai proses dinamis yang terjadi ketika dua atau lebih pihak-pihak yang saling terkait menghadapi konflik kepentingan atau permasalahan bersama yang diselesaikan dengan cara diplomatik dan bukan militer (Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001: 448).

Saunders berpendapat bahwa proses negosiasi terdapat lima fase, yaitu (Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001: 490-495):

- a. Fase keputusan untuk terlibat
Pihak yang terkait bersedia membuat keputusan untuk menuju perdamaian dan berusaha untuk mendefinisikan masalah pada konflik serta mencari cara untuk menjangkau anggota pihak lain dan membuka dialog.
- b. Fase pemetaan masalah dan hubungan
Dialog terbuka dengan periode mengekspresikan dan mengeksplorasi kepentingan masing-masing pihak. Agenda utama adalah memetakan hubungan bersama dan memahami permasalahan secara spesifik dan kepentingan yang mendasarinya menentukan hubungan tersebut.
- c. Fase menghasilkan keinginan untuk solusi bersama
Berusaha membangun keinginan untuk mengejar dan menerapkan solusi. Mengembangkan cara-cara untuk mengubah hubungan yang saling bertentangan dan memutuskan jalan mana yang harus di tempuh.
- d. Fase pembangunan skenario dan negosiasi

Dalam proses ini pihak yang terlibat akan merancang skenario langkah-langkah interaksi yang dapat mengubah hubungan yang rumit. Menggambarkan bagaimana kepentingan masing-masing pihak dan bagaimana menghasilkan solusi bagi konflik yang dihadapi.

- e. Fase bertindak bersama untuk menerapkan perjanjian
Pihak-pihak secara kooperatif melaksanakan kesepakatan mereka. Proses perdamaian bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang saling bertentangan kearah yang lebih baik. Partisipasi publik sangat penting untuk keberhasilan proses perdamaian secara keseluruhan.

Negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dengan FARC-EP merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya mengakhiri konflik panjang selama 52 tahun tersebut, agar terwujudnya perdamaian yang stabil dan abadi. Upaya negosiasi yang dilakukan juga salah satu metode diplomatik yang digunakan oleh pemerintah Kolombia dimasa presiden Juan Manuel Santos untuk menghadapi FARC-EP, yang jika tetap menggunakan cara militer maka kelompok gerilya kiri tersebut akan terus melanjutkan melakukan perang bersenjata.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana penulis menggambarkan bagaimana negosiasi pemerintah Kolombia dengan FARC-EP dalam mencapai kesepakatan damai dimasa kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos pada tahun 2012-2016. Adapun jenis data digunakan yaitu data sekunder, berupa data diperoleh dari studi telaah pustaka dan literatur-literatur seperti, buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis dan browsing internet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen dari bahasa pustaka. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Hasil Penelitian

Masa Kepemimpinan Presiden Belisario Betancur (1982–1986)

Perundingan damai antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP telah dimulai pada tahun 1982 dimasa presiden Belisario Betancur. Pembicaraan damai untuk pertama kalinya dilakukan di kotamadya Uribe, Kolombia. Pada bulan Mei perjanjian telah disepakati yang berisi mengenai gencatan senjata bilateral, amnesti dan akses keranah politik secara sah untuk anggota FARC-EP.

Dari perjanjian tersebut FARC-EP kemudian membentuk partai politik yaitu *Union Partiotica* (UP). Namun, UP mengalami banyak tekanan dari sektor militer negara dan para elit politik yang mana mereka tidak menyetujui adanya perundingan damai ini, serta hasil dari perjanjian tersebut. Mereka masih meyakini bahwa FARC-EP hanya dapat dikalahkan secara militer.

Sebanyak 1.598 anggota UP terbunuh oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Kolombia. Peristiwa ini berdampak negatif bagi proses perdamaian yang sedang berjalan. Pada akhirnya FARC-EP menarik diri dari proses

politik dan memilih untuk berfokus pada kemenangan secara militer yang mengakibatkan negosiasi gagal (Renata Segura, Delphine Mechoulan. 2017: 5).

Dimasa presiden Betancur kelompok gerilya ELN menolak untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian. ELN mengklaim bahwa mereka tidak akan tertipu pada amnesti atau gencatan senjata yang ditawarkan pemerintah dan menolak untuk mengambil bagian dalam aliansi politik. Kelompok gerilya besar lainnya yaitu EPL, turut berpartisipasi dalam pembicaraan damai, tetapi selama prosesnya diselingi oleh pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan kegagalan (Norman Offstein. 2003: 109).

Masa Kepemimpinan Presiden Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994)

Perundingan damai dilaksanakan kembali pada masa presiden Cesar Gaviria Trujillo ditahun 1990 yang diadakan di Venezuela dan Meksiko. Dalam perundingan ini FARC-EP dengan kelompok gerilya kiri lainnya seperti ELN dan EPL berkolaborasi dibawah payung kelompok gerilya yang disebut *the Simon Bolivia Guerilla Coordinating Group* (CGSB) yang merupakan organisasi yang dibentuk sebagai inisiatif ELN dalam mengikuti proses perdamaian dengan pemerintah (<https://www.ictj.org/news/peace-and-justice-negotiating-table-colombia-talks-peace-farc>).

Pertemuan pertama di Calaras, Venezuela harus terhenti akibat penyerangan yang dilakukan oleh FARC-EP terhadap iring-iringan senat pada September 1991. Kemudian perundingan dilanjutkan di Tlaxcala, Meksiko pada Maret 1992. Namun kembali terhenti karena penculikan oleh EPL terhadap Angelino Duran mantan menteri Kolombia. Lemahnya negosiasi ini karena tidak adanya kesepakatan prasyarat gencatan senjata antara kedua belah pihak saat proses negosiasi berlangsung (Angel Rabasa and Peter Chalk. 2000: 72). Pada masa ini juga EPL telah dibubarkan setelah melakukan perjanjian oleh pemerintah (Steven L. Taylor. 2016).

Masa Kepemimpinan Presiden Andrés Pastrana (1998-2002)

Dimasa presiden Andrés Pastrana perundingan damai dilakukan pada tahun 1999. Langkah yang diambil dalam perundingan ini yaitu dengan membentuk wilayah zona demiliterisasi seluas 42.000 km² di Kolombia selatan departemen Meta dan Caqueta. Zona tersebut dipergunakan untuk kepentingan proses perundingan antar keduanya. Namun zona tersebut disalahgunakan FARC-EP untuk membangun kekuatannya dan membudidayakan tanaman obat terlarang.

Gambar 1.1 Peta Zona Demiliterisasi



Sumber:http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1837000/1837597.stm

Dalam proses negosiasi ini banyak mengalami gangguan yang akhirnya pada 20 Februari tahun 2002 Presiden Pastrana memerintahkan pasukan militernya untuk merebut kembali zona demiliterisasi. Usaha perdamaian pun kembali mengalami kegagalan.

Presiden Pastrana juga melakukan perundingan dengan ELN yang dimulai pada 5 Februari 1998. Namun, Perundingan ini mengalami kebuntuan pada kesepakatan gencatan senjata bilateral, sehingga pada Mei 2002 presiden Pastrana mengakhiri proses perdamaian dengan ELN.

Masa Kepemimpinan Presiden Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)

Dibawah kepemimpinan presiden Alvaro Uribe Velez langkah yang diambil dalam menghadapi FARC-EP yaitu, dengan menggunakan pendekatan militer. Pada kepemimpinannya tidak mempertimbangkan untuk melakukan negosiasi, tetapi sebagai gantinya presiden Uribe mengeluarkan wacana “*War on Terror*” karena ia menganggap gerilyawan sebagai teroris dan menolak gagasan untuk melakukan kesepakatan dengan FARC-EP (William Zartman. 2015: 90).

Pada akhir tahun 2003 presiden Uribe memulai dengan strategi baru terhadap pasukan gerilya yang dikenal sebagai *Plan Patriota*. Strategi ini untuk menciptakan kekuatan militer yang kuat, merebut kembali tanah yang telah dimiliki oleh FARC-EP dan menyita peralatan yang digunakan untuk memproses kokain. Antara tahun 2003 dan 2006, pemerintah mengarahkan 18.000 pasukan di departemen Caquetá, Meta, Putumayo, dan Guaviare untuk melawan struktur FARC yang paling kuat yang berada di blok timur dan selatan.

Selama masa jabatan kedua presiden Uribe, kemajuan besar dilakukan untuk mengurangi kekuatan FARC-EP, seperti adanya beberapa peristiwa yaitu, tanggal 1 Maret 2008 pasukan militer Kolombia melakukan pengeboman pada kubu komandan kedua FARC-EP yaitu Raúl Reyes yang akhirnya tewas. Pada bulan Mei FARC-EP mengumumkan bahwa pemimpin tertinggi dan pendiri mereka Manuel Marulanda meninggal dunia dikarenakan mengalami serangan jantung pada bulan Maret. Dibulan Maret 2008 juga terjadi pembunuhan kepada seorang anggota sekretariat FARC-EP oleh penjaga keamanannya sendiri. Tiga kasus kematian tokoh besar FARC-EP ini merupakan pukulan yang signifikan bagi keberlangsungan kelompok mereka dan melemahkan kepemimpinan FARC-EP itu sendiri.

Upaya yang dilakukan oleh presiden Uribe setidaknya telah dapat menekan aksi agresif FARC-EP, meskipun masih belum mampu mewujudkan perdamaian di Kolombia. Pemimpin FARC-EP pernah mengatakan bahwa jika pemerintah Kolombia melanjutkan serangan militernya, maka FARC-EP tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjuangan bersenjata mereka. Selama 8 tahun terakhir tidak ada terjadi dialog dengan kelompok tersebut, karena presiden Uribe mengesampingkan adanya upaya pembicaraan antara kedua belah pihak.

Presiden Uribe pada kepemimpinannya juga berusaha mencoba melibatkan ELN dalam pembicaraan damai, tetapi tidak menuai hasil. Akhirnya Uribe memilih

memprioritaskan pada pelemahan ELN dengan menggunakan kekuatan militer sama seperti yang dilakukannya terhadap FARC-EP. Namun, langkah ini pun belum mampu menuntaskan kelompok tersebut.

Profil Presiden Juan Manuel Santos dan Keputusan Menggunakan Pendekatan Yang Diplomatik

Juan Manuel Santos Lahir pada 10 Agustus 1951 di Botota, dibesarkan didalam keluarga yang sangat politis. Paman buyutnya Eduardo Santos Montejo adalah presiden Kolombia periode 1938-1942. Keluarganya bahkan memiliki El Tiempo yang merupakan salah satu perusahaan surat kabar terbesar di Kolombia. Santos memperoleh gelar *Masters of Administration* dari Universitas Harvard (1981) lalu kembali ke Kolombia untuk bekerja sebagai editor di El Tiempo, dimana hasil laporannya membuatnya mendapatkan sejumlah penghargaan. Dalam karir politiknya Santos ditahun 1991 menjadi menteri perdagangan luar negeri di bawah presiden César Gaviria Trujillo. Ia adalah seorang pemimpin *Partido Liberal Colombiano* pada akhir 1990-an, kemudian dari 2000-2002 menjabat sebagai menteri perbendaharaan dan kredit publik dikabinet presiden Andrés Pastrana serta pernah menjabat menjadi menteri pertahanan dimasa kepemimpinan presiden Uribe pada periode 2006-2009 (<https://www.britannica.com/biography/Juan-Manuel-Santos>).

Karir potiliknya terus meningkat yang kemudian mampu membawanya menjadi presiden Kolombia dengan masa jabatan tahun 2010-2018. Terpilihnya menjadi presiden Kolombia tidak lepas dari peranan dan dorongan dari mantan presiden Uribe, yang mana merupakan tokoh populer yang banyak memiliki pendukung dan keduanya berada dipartai yang sama yaitu *Social Party of National Unity*. Uribe sangat mendukung Santos untuk maju dalam pemilihan presiden dan berharap dapat melanjutkan kebijakan militernya untuk melawan FARC-EP. Dalam kampanyenya juga Santos telah berjanji untuk melanjutkan kebijakan keamanan agresif pendahulunya.

Setelah menjadi presiden, Santos melakukan perubahan pendekatan yang berbeda dengan apa yang telah sampainya pada saat kampanye pemilihan presiden. Perubahan ini dilakukan oleh presiden Santos akibat dari FARC-EP dimasa presiden sebelumnya menyatakan bahwa jika pemerintah menggunakan cara militer maka FARC-EP tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjuangan bersenjata mereka. Presiden Santos juga meyakini bahwa berdamai berarti duduk bersama dengan musuh dan mulai melakukan perundingan untuk mencapai kedamaian tersebut. Dalam upaya diplomatiknya ia memulai melakukan perundingan damai dengan FARC-EP. Pada perundingan tersebut pemerintahan Santos menawarkan apa yang selama ini menjadi tuntutan FARC-EP seperti adanya reformasi lahan dan dapat berpartisipasi dalam ranah politik (Emma Pachon. 2017: 2). Walaupun utamanya menggunakan cara diplomatik, namun presiden Santos tetap melawan melalui militer tetapi dalam intensitas yang cenderung lebih rendah dari Uribe.

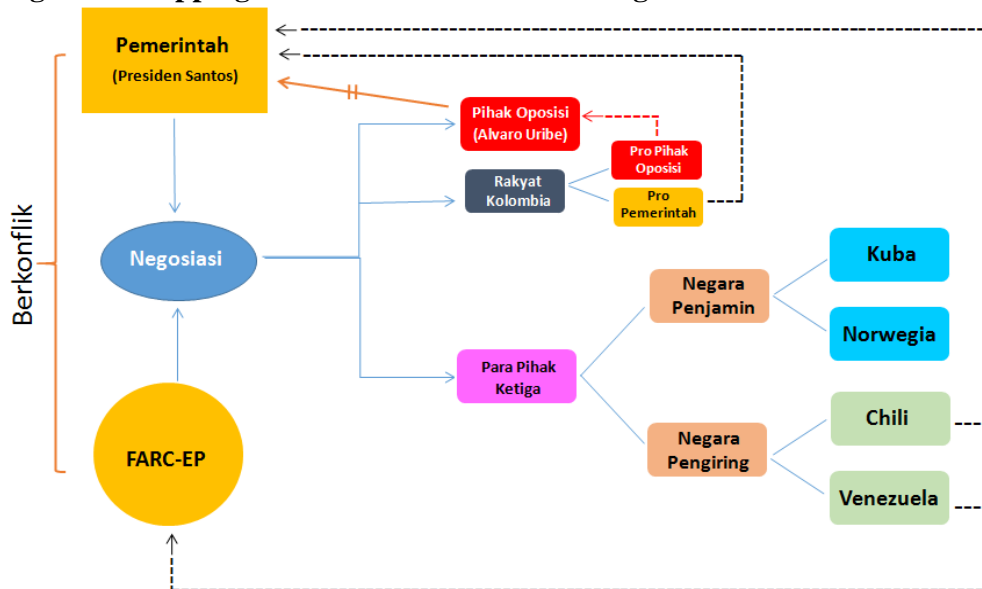
Dikepemimpinannya presiden Santos berfokus pada penyelesaian konflik dengan FARC-EP yang memang merupakan kelompok gerilya terkuat dan yang utama harus ditangani. Sedangkan, Pembicaraan awal pada proses perdamaian dengan kelompok

gerilya lainnya yaitu ELN baru dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016 sekitar bulan Mei (<https://www.bbva.com/en/timeline-colombian-peace-process/>).

Negosiasi Kolombia Dengan Kelompok Gerilya Kiri FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia - Ejército Del Pueblo) Tahun 2012-2016

Dalam proses perundingan damai antara pemerintah dan FARC-EP terdapat beberapa aktor yang terlibat. Aktor-aktor ini mempengaruhi jalannya proses perundingan, ada yang membawa kearah yang lebih baik, namun juga ada yang menghambat.

Bagan 1.1 Mapping Aktor Pada Proses Perundingan



Sumber: Diolah oleh penulis

Keterlibatan aktor internasional dalam proses perdamaian ini merupakan hal yang sangat berharga. Terdapat pihak ketiga utama yaitu, Norwegia, Kuba, Venezuela dan Chili. Norwegia dan Kuba adalah aktor internasional utama yang berfungsi sebagai negara penjamin atas proses tersebut yang dipilih oleh pemerintah Kolombia atas persetujuan dari FARC-EP. Negara penjamin bertugas memberikan bantuan teknis dan keuangan, dukungan moral serta perlindungan untuk mencapai perdamaian. Aktor lainnya seperti Venezuela dan Chili bertindak sebagai negara pengiring dalam proses perdamaian ini. Venezuela merupakan negara pengiring dari pihak FARC-EP dan Chili dari pihak pemerintah. Keterlibatan kedua negara tersebut terutama bertindak sebagai pengamat (William Zartman. 2015: 96).

Pihak oposisi pada proses perundingan ini menggunakan kekuatannya untuk menggiring pola pikir masyarakat Kolombia terhadap proses diplomatik yang sedang berlangsung sehingga terdapat masyarakat yang pro kepada pemerintah dan pro kepada pihak oposisi. Dukungan rakyat juga memiliki peran penting untuk dapat mencapai keberhasilan.

Dalam proses negosiasi pemerintah dengan FARC-EP ini, adapun langkah-langkah negosiasi menurut Saunders yaitu, fase keputusan untuk terlibat, fase pemetaan masalah dan hubungan, fase membuat keinginan untuk solusi bersama, fase

pembangunan skenario dan negosiasi, fase bertindak bersama untuk menerapkan perjanjian, langkah-langkah tersebut akan digambarkan sebagai berikut.

1. Fase Keputusan Untuk Terlibat

Proses perundingan damai pada masa kepemimpinan presiden Juan Manuel Santos dimulai dengan melakukan pembicaraan rahasia. Pada tahap rahasia proses perdamaian ini dimulai dengan pertukaran surat dalam rangka untuk membentuk suatu pertemuan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari keduanya yaitu, Pablo Catatumbo yang merupakan anggota sekretariat FARC-EP dan Henry Acosta seorang tokoh ekonomi Kolombia yang telah memfasilitasi kontak antara pemerintah dan FARC-EP selama bertahun-tahun, termasuk pada masa pemerintahan presiden Sansos. Setelah pelantikan presiden Santos pada bulan Agustus 2010, Acosta segera menjangkaunya dan menjalin kontak antara pemerintah Kolombia dan FARC-EP. Pada awal tahun 2011, Venezuela memfasilitasi pertemuan awal antara utusan dari pemerintah dan FARC-P di wilayah perbatasan Venezuela dan Kolombia. Lalu tiga pertemuan berikutnya diadakan di sebuah pulau di Venezuela. Keempat pertemuan tersebut berlangsung antara bulan Maret sampai bulan Oktober 2011 untuk mempersiapkan tahap eksplorasi (Renata Segura and Delphine Mechoulan. 2017: 10).

Keterlibatan Venezuela sebagai negara pengiring yang memfasilitasi pertemuan FARC-EP dengan pemerintah dikarenakan presiden Venezuela yaitu Chavez sangat berpengaruh pada awalnya mendorong FARC-EP untuk berpartisipasi dalam perundingan damai dengan pemerintah dan FARC-EP pun menginginkan Venezuela untuk berperan dalam perundingan yang sedang berlangsung. Venezuela merupakan tempat persembunyian bagi FARC-EP yang sekaligus menjadi tempat perdagangan narkoba. Karena ada penyalahgunaan wilayah yang dilakukan oleh FARC-EP di perbatasan Venezuela yang mana dapat mengganggu kedaulatan negara, maka dari itu pemerintah Venezuela sepakat dengan pemerintah Kolombia untuk bersedia bergabung dalam perundingan tersebut agar permasalahan ini segera terselesaikan dan wilayah perbatasan menjadi aman (William Zartman. 2015: 97).

Ketersediaan FARC-EP untuk terlibat dalam perundingan ini juga dipengaruhi oleh kekuatan mereka yang mulai menurun sejak kepemimpinan presiden Uribe yang menggunakan pendekatan militer intensif terhadap FARC-EP dan juga kehilangan beberapa pimpinan utama mereka. Kehilangan para pemimpin besar menyebabkan pengaruh FARC-EP kemudian memudar. Pemimpin baru FARC-EP, yaitu Rodrigo Londoño Echeverri yang sering juga disebut Timochenko, menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah mereka diskusikan tetap berjalan dan dialog tetap berlanjut tidak terputus meskipun pemimpin terdahulu yaitu Alfonso Cano telah meninggal, karena hal ini merupakan kehendak Cano. FARC-EP menuai tanggapan positif dari pemerintah presiden Santos, karena ini dinilai sebagai tanda tegas komitmen penuh para gerilyawan kiri tersebut terhadap proses perdamaian.

2. Fase Pemetaan Masalah Dan Hubungan

Pada proses ini keduanya melakukan pemetaan masalah dan hubungan. Dalam konflik ini masalah yang dihadapi oleh FARC-EP kepada pemerintah yaitu, pendistribusian tanah yang tidak merata. FARC-EP ingin pemerintah dapat

memperlakukan warga negaranya dengan adil terhadap kaum bawah dan melakukan pelayanan masyarakat bagi kehidupan warga di pedesaan untuk menjadi lebih baik dalam hal yang berkaitan dengan distribusi tanah. Selanjutnya, FARC-EP pun menginginkan pemerintah memberikan kesempatan kembali bagi FARC-EP untuk berpartisipasi didalam ranah politik terutama bagi gerakan oposisi yang diharapkan adanya jaminan bagi mereka untuk mendapat rasa aman dan adil dalam berpartisipasi diranah politik.

Kemudian permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah membuat kesepakatan dengan FARC-EP untuk mengahiri konflik bersenjata yang selama 50 tahun lebih ini berlangsung. Pemerintah juga berusaha untuk dapat menghentikan kegiatan perdagangan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh FARC-EP. Bagi pemerintah permasalahan ini bukan hanya mengenai konflik dengan FARC-EP saja, namun juga masalah lain timbul yang berasal dari para korban konflik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak yang dimiliki para korban.

Pada awal pembicaraan negosiasi, para pihak yang bertikai memutuskan bahwa Kuba dan Norwegia akan bertindak sebagai negara penjamin selama tahap eksplorasi ini dan tahap selanjutnya. Kuba sebagai tuan rumah perundingan dalam proses perdamaian ini bertindak sebagai pemain kunci dalam pembicaraan tersebut. Kuba bisa dibilang sebagai satu-satunya negara dimana FARC-EP merasa nyaman untuk terlibat dalam negosiasi. FARC-EP melihat Kuba sebagai pihak ketiga yang dapat diterima dan juga sangat berpengaruh dalam membawa FARC-EP ke meja perundingan, karena faktanya bahwa Kuba merupakan negara yang secara ideologis paling dekat dengan gerilya sayap kiri. Perannya sebagai tuan rumah sangat baik dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pihak. Penting juga untuk diketahui bahwa perundingan hanya dapat diselenggarakan di negara yang dapat menjamin bahwa peradilannya tidak akan menangkap anggota FARC-EP. Menjadi tuan rumah bagi perundingan ini merupakan titik kebanggaan bagi negara dan upaya Havana untuk menunjukkan peran diplomatinya dalam membantu mencapai perdamaian (William Zartman. 2015: 95).

Norwegia juga merupakan salah satu pemain kunci dalam proses perdamaian di Havana dan juga bertanggung jawab atas infrastruktur, desain dan pengembangan pembicaraan serta pendanaan, mengingat reputasi internasionalnya dibidang resolusi konflik, pembangunan perdamaian, kapasitas politik dan logistik yang luar biasa. Penting juga bahwa Norwegia bukan bagian dari Uni Eropa, karena itulah dapat bebas untuk memberikan dana kepada delegasi FARC-EP. Hal itu merupakan sesuatu yang anggota Uni Eropa tidak dapat lakukan karena kelompok tersebut terdaftar sebagai organisasi teroris (June S. Beittel. 2014: 3).

Pada Februari 2012, kedua belah pihak yang bertikai yaitu pemerintah Kolombia dan FARC-EP memulai melakukan perundingan eksplorasi rahasia di Havana. Perundingan rahasia ini berlangsung dari 24 Februari hingga 26 Agustus 2012. Tujuan dari tahap perundingan eksplorasi rahasia ini adalah untuk membangun sebuah kesepakatan kerja yang akan membawa alur negosiasi kearah yang tepat. Pemerintah mengalami tantangan yang besar dalam proses ini, yaitu membangun agenda bersama dengan FARC-EP.

3. Fase Membuat Keinginan Untuk Solusi Bersama

Setelah pemerintah Kolombia dan FARC-EP melakukan eksplorasi terhadap kepentingan dan masalah yang dihadapi oleh keduanya dengan melaksanakan perundingan rahasia di Havana, untuk berusaha membangun kesepakatan agar memperoleh solusi, maka dari perundingan rahasia tersebut menghasilkan enam agenda utama yaitu:

1. Pembangunan Pedesaan dan Kebijakan Pertanian (*Rural Development And Land Policy*)
2. Partipasi Politik (*Political Participation*)
3. Mengakhiri Konflik Bersenjata (*An End To The Conflict*)
4. Kebijakan Perdagangan Obat-obatan Terlarang (*Illicit Drugs*)
5. Keadilan Bagi Korban (*Victim's Right*)
6. Implementasi Kesepakatan Damai (*Implementation Of The Final Negotiated Agreement, Including Its Ratification And Verification*).

Pada 27 Agustus 2012, kedua belah pihak yang didampingi oleh para negara pihak ketiga yaitu Kuba tentunya sebagai tuan rumah dan Norwegia sebagai negara penjamin, serta Venezuela dan Chili sebagai negara pengiring, menandatangani agenda tersebut. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa tidak ada yang disepakati sampai semuanya disepakati dan komitmen para pihak untuk kerahasiaan diskusi di meja perundingan, serta untuk selalu mengeluarkan pernyataan bersama dan disepakati bersama.

Sehari setelah penandatanganan perjanjian kerangka kerja tersebut di Havana, salinan kemudian bocor ke media. Presiden Santos mengeluarkan pernyataan singkat pada siaran langsung di televisi yang mengonfirmasi bahwa pemerintahannya telah melakukan negosiasi dengan FARC-EP secara rahasia dan akan segera mengumumkan awal pembicaraan damai yang resmi. Pada fase ini Pemerintah Kolombia dan FARC-EP berhasil merancang langkah-langkah untuk mengubah hubungan antara keduanya ke arah yang lebih baik dengan 6 agenda utama yang telah terbentuk.

4. Fase Pembangunan Skenario Dan Negosiasi

Pada tanggal 24 September 2012 presiden Santos dan pemimpin FARC-EP yaitu Rodrigo Londoño Echeverri mengumumkan bahwa proses negosiasi secara resmi akan segera dilaksanakan. Kemudian proses negosiasi tersebut diumumkan resmi pada tanggal 18 Oktober 2012 di Oslo, Norwegia. Setelah itu proses negosiasi resmi, berlangsung di Havana, Kuba. Perundingan ini akan membangun 6 agenda utama tersebut untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan yang dapat menghasilkan solusi dalam mencapai perdamaian (Dag Nylander, Rita Sandberg and Idun Tvedt. 2018: 3).

- a. Pembangunan Pedesaan dan Kebijakan Pertanian (*Rural Development And Land Policy*)

Pembahasan mengenai agenda pembangunan pedesaan dan kebijakan pertanian (*Rural Development And Land Policy*) dilaksanakan oleh kedua belah pihak pada 14 Januari 2013. Kemudian pada 26 Mei 2013 negosiator mengumumkan bahwa mereka membuat perjanjian pertama pada agenda tersebut, yang menyetujui reformasi agraria. Pemerintah menciptakan *Land Fund (Fondo de Tierras)* untuk distribusi tanah gratis kepada masyarakat pedesaan yang tidak memiliki tanah atau dengan

tanah yang tidak mencukupi, sebanyak 3 juta hektar tanah dalam periode 10 tahun pertama. Selain itu, terdapat rencana formalisasi sertifikat tanah dan kepemilikan. Akses lain pada mekanisme pertanahan akan diperkuat, seperti program subsidi dan kredit untuk membeli tanah yang tersedia bagi orang-orang yang tidak memiliki tanah, memiliki tanah yang tidak memadai, memprioritaskan kepada perempuan pedesaan, kepala rumah tangga perempuan dan pengungsi. Terdapat juga pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, model ekonomi pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun wilayah pedesaan serta adanya sistem keamanan pangan.

b. Partipasi Politik (*Political Participation*)

Pada 6 November 2013 pemerintah Kolombia dan FARC-EP, mencapai kesepakatan pada salah satu agenda utama yaitu, Partipasi Politik (*Political Participation*). Dalam kesepakatan ini terdapat hak dan jaminan untuk melaksanakan oposisi politik secara umum dan untuk gerakan baru yang muncul setelah penandatanganan perjanjian akhir serta mekanisme demokratis untuk partisipasi warga negara.

c. Kebijakan Perdagangan Obat-obatan Terlarang (*Illicit Drugs*)

Pada 16 Mei 2014 para negosiator dari kedua belah pihak mengumumkan telah tercapainya kesepakatan mengenai agenda obat-obatan terlarang. FARC-EP dan pemerintah Kolombia sepakat untuk membuat program nasional untuk menerapkan substitusi tanaman terlarang dan untuk mengatasi konsumsi obat-obatan terlarang dengan pendekatan kesehatan masyarakat dan kapasitas kelembagaan penegak hukum akan diperkuat untuk mengurangi kelompok-kelompok kriminal yang terlibat dalam produksi dan perdagangan narkoba.

d. Keadilan Bagi Korban (*Victim's Right*)

Pada 15 Desember 2015, FARC-EP dan tim negosiasi pemerintah menyepakati perjanjian pada poin agenda utama yang selanjutnya yaitu mengenai Keadilan Bagi Korban (*Victim's Right*). Mengkompensasi para korban adalah inti dari kesepakatan, dalam hal ini yang dibahas yaitu mengenai hak asasi manusia para korban dan kebenaran yang mana mekanisme ini dibuat untuk berkontribusi pada pengakuan para korban, tanggung jawab mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik bersenjata dan kebenaran tentang apa yang terjadi. Selain itu terdapat yuridiksi khusus perdamaian yang mengatur mengenai hukuman yang akan diterima para gerilyawan.

5. Fase Bertindak Bersama Untuk Menerapkan Perjanjian

Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Kolombia dan FARC-EP mengakhiri lebih dari setengah abad konflik bersenjata ini dengan penandatanganan perjanjian untuk gencatan senjata bilateral dan peletakan senjata antara pemerintah Kolombia dan FARC-EP. Upacara perjanjian ini dilaksanakan di Havana, pengumuman ini dibuat oleh delegasi dari negara penjamin yaitu, Kuba dan Norwegia dihadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon dan presiden Meksiko, Chili, Kuba dan Venezuela. FARC-EP setuju untuk menyerahkan senjata mereka ketangan PBB. Kemudian dilanjutkan pada 18 Juli 2016 Mahkamah konstitusi Kolombia menyetujui plebisit perdamaian yang akan memungkinkan masyarakat Kolombia untuk memberikan suara pada perjanjian.

a. Mengakhiri Konflik (*An End To The Conflict*)

Pada 24 Agustus 2016, para negosiator dari kedua belah pihak secara resmi meluncurkan perjanjian untuk mengakhiri 52 tahun konflik yang telah menimbulkan banyak korban ini (*An End To The Conflict*). Presiden Santos mengumumkan bahwa kesepakatan itu secara resmi akan ditandatangani pada 26 September 2016 di Cartagena dan diajukan dihadapan publik dalam referendum (plebisit) pada 2 Oktober 2016. Terdapat beberapa poin didalamnya yaitu:

1. Gencatan senjata bilateral dan definitif serta penghentian permusuhan.
2. Serah terima senjata, reintegrasi FARC-EP ke dalam kehidupan sipil, ekonomi, sosial dan politik, sesuai dengan kepentingan mereka.
3. Pemerintah Nasional akan berkoordinasi untuk merevisi situasi orang-orang yang ditahan, didakwa, atau dihukum karena memiliki atau bekerja sama dengan FARC-EP.
4. Jaminan keamanan.

b. Implementasi Kesepakatan Damai (*Implementation Of The Final Negotiated Agreement, Including Its Ratification And Verification*)

Implementasi kesepakatan damai (*Implementation Of The Final Negotiated Agreement, Including Its Ratification And Verification*) juga telah disepakati, untuk menjamin kepatuhan dengan perjanjian, untuk menetapkan mekanisme pelaksanaan yang tepat dan untuk memantau serta memverifikasi terhadap komitmen.

Sebelum pelaksanaan plebisit pada 2 Oktober 2016, terlebih dahulu diadakan jajak pendapat terhadap respon masyarakat pada perjanjian damai ini. Dari hasil jajak pendapat sebanyak 66% menyatakan bahwa mereka akan memilih “Ya” dalam plebisit. Dengan adanya respon ini presiden Santos optimis bahwa plebisit akan berhasil (<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/colombia-referendum-rejects-peace-deal-with-farc>).

Presiden Santos menyampaikan dalam kampanye untuk plebisit, bahwa jika rakyat memilih “Ya” maka FARC-EP akan berhenti eksis sebagai kelompok pemberontak. Namun jika rakyat Kolombia menolak kesepakatan damai ini maka pertempuran akan berlanjut dengan FARC-EP sebagai *plan-B* dari pemerintah Kolombia, yang mana jika ini terjadi dapat mengakibatkan bertambahnya korban jiwa dan kesengsaraan yang akan dialami rakyat Kolombia. Hal inilah yang mendasari hasil dari jajak pendapat menyatakan bahwa sebagian masyarakat menerima perjanjian ini (<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/colombia-referendum-rejects-peace-deal-with-farc>).

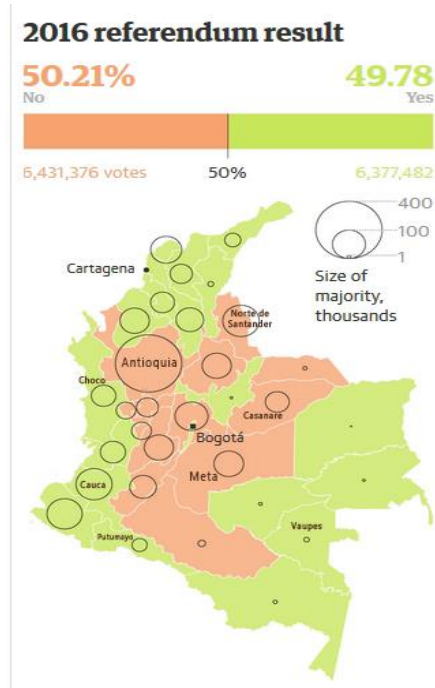
Dari sisi FARC-EP sendiri juga membuktikan kesungguhannya untuk berdamai. Para pemimpin mereka meminta maaf atas kejahatan pasukannya dan berdiskusi dengan masyarakat tentang cara mereka memberikan kompensasi kepada seluruh korban. Pada 1 Oktober 2016, dengan dihadiri para pengamat PBB, FARC-EP secara sukarela menghancurkan 620 kilogram granat dan peledak ringan dan juga mengatakan akan memberikan kompensasi kepada seluruh korban dengan sumber keuangan yang dimiliki dan lahan-lahan yang dikuasai selama 52 tahun berperang (<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/colombia-referendum-rejects-peace-deal-with-farc>).

Dalam proses menuju plebisit ini terdapat tekanan dari pihak oposisi yaitu mantan presiden Uribe yang melakukan kampanye untuk memilih “Tidak”. Uribe sangat menentang beberapa kesepakatan dari perjanjian tersebut yang mengenai peradilan untuk FARC-EP yang dianggap terlalu lunak. Menurutnya, hasil dari kesepakatan itu yang memberi pengampunan terhadap FARC-EP, sangat tidak adil bagi korban yang terkena dampak dari tindakan kekerasan yang telah dilakukan FARC-EP. Perbuatan mereka dalam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihukum sesuai dengan hukum internasional dan domestik.

Terbentuknya Yuridiksi Khusus untuk Perdamaian (*Jurisdicción Especial para la Paz*) yang akan membahas mengenai keadilan transisi bagi FARC-EP adalah pengadilan yang dinegosiasikan secara bilateral oleh kedua belah pihak, yang didalamnya terdapat impunitas dari pemerintah Kolombia untuk FARC-EP. Didalam yuridiksi tersebut menyatakan dengan tegas bahwa para pelaku (gerilyawan FARC-EP) yang mengakui melakukan kejahatan akan tidak hanya dibebaskan dari hukuman penjara tetapi juga dari segala bentuk penahanan yang setara. Pelaku yang menolak untuk mengakui, memberi pengakuan yang tidak lengkap atau memberi pengakuan setelah persidangan berlangsung dan kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka akan menghadapi hukuman penjara 15 sampai 20 tahun (<https://www.hrw.org/news/2015/12/21/human-rights-watch-analysis-colombia-farc-agreement>).

Uribe ingin membatalkan perjanjian tersebut. jika perjanjian itu berlanjut Uribe ingin adanya koreksi pada beberapa isi perjanjian menjadi, bahwa mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik dan para pemimpin FARC-EP harus menjalani hukuman penjara karena kejahatan yang dilakukan.

Gambar 1.2 Hasil Referendum 2016



Sumber: Plebiscito.registraduria.gov.co, Colombia.com

Upaya Uribe ini berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat Kolombia terhadap plebisit ini. Jajak pendapat yang kembali dilakukan menghasilkan bahwa pemilih “Ya” menurun. Penurunan ini terus terjadi sampai pada hari dimana plebisit dilaksanakan yaitu pada 2 Oktober 2016. Hasil plebisit kemudian menyatakan 50,21% rakyat Kolombia memilih “Tidak” dan 49,78% memilih “Ya” (<https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/colombia-referendum-rejects-peace-deal-with-farc>).

Pihak oposisi berhasil mengubah sebagian suara masyarakat yang pro terhadap perjanjian antara pemerintah dan FARC-EP ini menjadi suara “Tidak”. Masih sulit bagi mereka untuk menerima FARC-EP menjadi warga sipil kembali dan dapat masuk keranah politik tanpa terlebih dahulu menjalani hukuman atas kejahatan mereka.

Hasil plebisit menyatakan “Tidak”, namun presiden Santos tetap memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan. Presiden Santos memilih untuk tetap melanjutkan perjanjian ini dan ditandatangani kembali. Pada 24 November 2016, setelah 4 tahun melakukan negosiasi akhirnya perwakilan dari pemerintah Kolombia dan FARC-EP menandatangani perjanjian damai akhir untuk mengakhiri konflik dan membangun perdamaian yang stabil dan bertahan lama. Penandatanganan perjanjian ini menggantikan perjanjian pada tanggal 24 Agustus 2016 yang ditolak dalam referendum (plebisit).

Walaupun sempat ditolak, perjanjian damai ini harus tetap dilakukan. Meskipun tidak sempurna, namun perjanjian itu mewakili cara konkret mencapai perdamaian. Sangat penting bahwa Kolombia tidak meninggalkan proyek ini dan negara terus bergerak menuju perdamaian yang telah dinantikan masyarakat. Pemimpin FARC-EP juga mengatakan bahwa mereka mempertahankan keinginannya untuk berdamai meskipun mengalami kegagalan pada plebisit untuk menyetujui perjanjian sebelumnya yang ditandatangani dengan pemerintah. Ini merupakan perjanjian damai yang mengakhiri konflik bersenjata non-internasional antara pemerintah Kolombia dan FARC-EP. Perjanjian ini terdiri dari enam (agenda utama) perjanjian berbeda yang ditandatangani oleh para pihak di waktu yang berbeda. Perjanjian ini disetujui oleh kedua cabang parlemen dan mulai berlaku pada 1 Desember 2016.

Kesimpulan

Proses perundingan damai antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP mencapai keberhasilan. Dalam negosiasi ini figur presiden Santos sendiri sangat berpengaruh terhadap jalannya perundingan. Latar belakang dan pengalamannya dalam dunia politik membawanya untuk menggunakan pendekatan yang lebih diplomatik, yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Presiden Santos juga memberikan apa yang menjadi tuntutan FARC-EP yaitu, dilakukannya reformasi lahan agar distribusi tanah merata dan dapat berpartisipasi keranah politik yang tidak didapatkan dimasa para presiden sebelumnya. Tidak hanya itu, dikepemimpinannya Santos fokus pada perundingan damai dengan FARC-EP. Berbeda dengan para presiden sebelumnya yang fokusnya harus terbagi untuk beberapa kelompok gerilya besar lainnya, yang mana menjadi salah satu penyebab gagalnya perundingan-perundingan terdahulu.

Komitmen FARC-EP untuk terlibat dalam perundingan ini merupakan poin penting dalam pencapaian keberhasilan. Komitmen ini tidak lepas dari mulai lemahnya kekuatan FARC-EP akibat kehilangan para tonggak utama kelompok dan permintaan dari pemimpin FARC-EP yaitu Alfonso Cano untuk tetap melanjutkan proses negosiasi tersebut.

Peran para pihak ketiga yaitu Kuba, Norwegia, Venezuela dan Chili juga merupakan komponen penting yang mempengaruhi jalannya proses perdamaian ini. Keberadaan mereka sebagai negara penjamin dan pengiring yang memberikan fasilitas dan lingkungan yang baik serta aman untuk kedua belah pihak yang bertikai melakukan perundingan, sehingga mampu mencapai keberhasilan.

Pergerakan pihak oposisi menjadi penghalang bagi pemerintah dan FARC-EP dalam proses perundingan ini. Pihak oposisi menggiring pola pikir publik agar kontra terhadap perjanjian yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun pergerakan itu masih belum mampu untuk menggagalkan perjanjian tersebut. Karena kekuasaan tertinggi tetap berada ditangan presiden Santos. Keputusan akhir presiden Santos adalah tetap melanjutkan perjanjian tersebut dengan ditandatanganinya perjanjian kembali oleh kedua belah pihak. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka berhasilah kedua belah pihak dalam mewujudkan perdamaian.

DaftarPustaka

Buku

Crocker, Chester A., Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2001. *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*. United States Institute Of Peace. Washington, D.C.

Fisher, Roger and William Ury. *Getting to Yes: Negotiating An Agreement Without Giving In*. Random House Business Books.

Holsti, K.J. 1988. *Kerangka Untuk Analisis*, Ed. 4 Jilid 2 Terj. M. Tahir Azhary. Erlangga. Jakarta.

Jeong, Ho Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Routledge. New York.

Miall, Hugh, Oviler Ramsbothamdan Tom Woodhouse. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras)*, Ed. 1 Cet. 2 Terj. Tri Bhudi Sastrio. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Zartman, William. 2015. "Colombia: Understanding Conflict 2015". Johns Hopkins University.

Jurnal

Beittel, June S.. 2015. "Peace Talks in Colombia: Analyst in Latin American Affairs". Congressional Research Service.

Mignone, Roberto. “*The Colombian Conflict in Historical Perspective: The evolution of the Land Issue*”. Latin American History. Atlantic International University.

Miranda, Dea. “Strategi *Counterinsurgency* Kolombia Terhadap FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia*) 2010-2012”. eJournal.

Nussio, Enzo. 2016. “*Peace and Violence in Colombia*”. Center for Security Studies (CSS), No. 191, May 2016.

Segura, Renata, and Delphine Mechoulan. 2017. “*Made in Havana: How Colombia and the FARC Decided to End the War*”. International Peace Institute.

Sernbo, Carl. 2013 “*Land Restitution in Colombia – Prospects of Increasing Agricultural Productivity*”, Bachelor Thesis, LUND University.

“*The Internal Armed Conflict In Colombia*”. 2016. Note 2: Context of the Colombia conflict. Avocats Sans Frontieres Canada.

Internet

Brodzinsky, Sibylla. 2016. “*Colombia referendum: voters reject peace deal with Farc guerrillas*”. The Guardian, terdapat di <https://www.theguardian.com/world/2016/oct/02/colombia-referendum-rejects-peace-deal-with-farc> diakses pada 4 Maret 2019.

Garzón, Miriam. 2016. “*Timeline of The Colombian Peace Process*”. BBVA Colombia, terdapat di <https://www.bbva.com/en/timeline-colombian-peace-process/> diakses pada 10 Februari 2020.

Matthews, Hannah. 2018. “*So much land in the hands of so few*”. PBI Colombia, terdapat <https://pbicolombia.org/2018/01/02/so-much-land-in-the-hands-of-so-few/> diakses pada 17 Mei 2018.

Pachon, Emma. 2017 “*President Santos: A Success or Failure?*” *Research Associate at the Council on Hemispheric Affairs* diakses pada 29 Juli 2019.

“*Peace and Justice at the Negotiating Table: Colombia Talks Peace with FARC*”. 2012. ICTJ. terdapat di <https://www.ictj.org/news/peace-and-justice-negotiating-table-colombia-talks-peace-farc>, diakses pada 20 November 2018.

Wallenfeldt, Jeff and Michael Ray. “*Juan Manuel Santos president of Colombia*”. Encyclopedia Britannica, terdapat di <https://www.britannica.com/biography/Juan-Manuel-Santos> diakses pada 23 November 2019.

Taylor, Steven L.. 2016. “*Colombia: On the Brink of Peace with the FARC?*”, vol. 10, issue 1 - October 2016, terdapat di <https://origins.osu.edu/article/colombia-brink-peace-farc> , diakses pada 10 Februari 2020.